



IPB University
— Bogor Indonesia —

Judul: Kata Sambutan Pada Buku Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani.

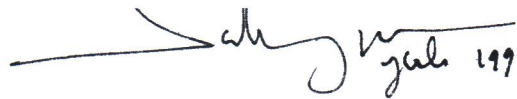
Penulis: Sajogyo

Saran Pengutipan: Sajogyo. *Kata Sambutan* pada Pelzer, Karl J. (1991). *Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani Laporan Penelitian*. Jakarta: Pustaka Sinar harapan.

Sumber: Perpustakaan Sajogyo Institut

Digitalisasi dan penyebarluasan karya-karya Sajogyo ini merupakan bagian dari Peringatan Milad 100 Tahun Sajogyo (21 Mei 1926-21 Mei 2026) yang diselenggarakan atas kerja sama Sajogyo Institute dan IPB University.

Dokumen digital karya-karya Sajogyo dapat diakses dan diunduh melalui Repository IPB University (<https://repository.ipb.ac.id/>) dan tapak maya Sajogyo Institute (<https://sajogyo-institute.org/>).

 July 199

Karl J. Pelzer

SENGKETA AGRARIA

Pengusaha Perkebunan
Melawan Petani



PUSTAKA SINAR HARAPAN
Jakarta 1991

Perpustakaan Nasional *Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

PELZER, Karl J

Sengketa Agraria. pengusaha perkebunan melawan petani/Karl J Pelzer diterjemahkan oleh Bosco Carvallo — Jakarta Pustaka Sinar Harapan, 1991
226 hlm 21 cm

Judul asli *Planters against Peasants the Agrarian Struggle in East Sumatera, 1947-1959*
Bibliografi
ISBN 979-416-131-4

I Tanah, Penggunaan I Judul
II Carvallo, Bosco

333 731 3

SENGKETA AGRARIA

Pengusaha Perkebunan Melawan Petani
Oleh Karl J Pelzer

91/SP/07

Desain Sampul oleh Yayak P

Judul Asli *Planters against Peasants the Agrarian Struggle in East Sumatera 1947 1958*

Verhandelingen van het Koninklyk Instituut voor Taal, Landen/Volkenkunde 'S-Gravenhage — Martinus Nijhoff, 1982

Hak terjemahan Indonesia pada Pustaka Sinar Harapan
Diterjemahkan oleh Bosco Carvallo

Hak Cipta dilindungi Undang undang

Diterbitkan oleh Pustaka Sinar Harapan, anggota Ikapi
Jakarta, 1991

Dicetak oleh PT Midas Surya Grafindo

KATA SAMBUTAN PROF SAYOGYO

I

Buku Karl Pelzer ini adalah kelanjutan cerita *) dari pelaku utama dalam “tuan kebun” dan “petani” di Sumatra Utara (bagian timur) Dalam bagian kedua ini digambarkan perlawanan satu sama lain antara para pelaku utama itu dalam masa 1947-1958

Sebagai seorang peneliti muda yang sempat mengikuti selama empat bulan studi masalah agraria di Sumatra Utara, tahun 1955/56 yang dilakukan Karl Pelzer (guru besar Universitas Yale) dan pada tahap berikutnya (1956) di Sumatra bagian selatan, di Lampung menemukan contoh wilayah luas pembukaan baru (teruka, bahasa Jawa) dan mulai memakai istilah “transmigrasi spontan” (mandiri) (tesis doctoral dalam bidang Pertanian, Universitas Indonesia di Bogor, tahun 1955) Pernah saya mengajukan tesis bahwa dua kasus itu, Sumatra Utara (bagian timur) dan Lampung adalah satu bentuk “*land reform* spontan” dari masyarakat petani kecil kita Memang proses itu tidak bebas dari dorongan pemerintah yang berwenang di zaman perang Pasifik dan masa Revolusi Fisik kebangunan RI (1945 - 1949), sebagian memanfaatkan lahan perkebunan besar dan di Jawa, juga Tanah Negara, khususnya yang berhutan

Dari segi pandang tesis itu UUPA 1960 dan *Land Reform* 1960 - 1965 merupakan bentuk intervensi negara yang “tertinggal kereta api” (zaman)!

Dan kasus Sumatra Utara yang diuraikan Karl Pelzer dalam buku ini adalah kasus “upaya pengelolaan *land reform* 1960 nasional yang formal Kasus itu terutama dibangun dari penelaahan sekian banyak dokumen di pihak “tuan kebun” dan secara lebih terbatas, sumber dokumen pemerintah dan berita/tajuk di pers daerah Istilah yang paling sering ditemukan adalah “penduduk liar” petani yang melakukan okupasi lahan konsesi perkebunan besar secara tidak sah

*) *Toean Keboen dan Petani* Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1985

(Kata "liar" dalam bahasa Belanda *wild*, sama halnya istilah "sekolah liar" yang sempat dipakai Hindia Belanda ke alamat sekolah swasta yang didirikan pemimpin gerakan nasional) Walau frekuensi besar pemakaian kata "penduduk liar" itu menunjuk pada sumber utama dokumentasi yang dipakai, hal itu tak menjadikan penulis buku berpihak berat sebelah kepada "tuan kebun" uraiannya cukup seimbang

Uraian dari "kasus *land reform* yang sempat diterbitkan masih jarang di Indonesia, misalnya kasus "tanah konversi" 1948 di Yogyakarta (waktu itu ibu kota RI) yang disinggung oleh Pelzer Bahkan hasil studi kasus "*land reform*" setelah ada payung UUPA 1960 menonjol dalam kelengangan! Atas dasar itu saja kasus Sumatra Utara (bagian timur) masa 1947-1958 ini sudah merupakan satu kontribusi berharga!

II

Siapa yang diharap dapat belajar dari sejarah (sejumlah kasus) "*land reform*" di Indonesia? Siapa yang menduga, setelah adanya UUPA 1960 memastikan jalur pembangunan agraria akan mulus, adalah pengamat optimis yang kurang berdasar Pertama, masih cukup banyak unsur dari ketentuan UUPA 1960 sampai kini belum ada penjabaran yang jelas, misalnya "fungsi sosial" hak milik atas tanah, pada hal sudah ada upaya membuka jalur pembuatan sertifikatnya! (Bahkan ada rencana membuka jalur pengelolaan urusan hak milik tanah itu secara komersial!) Kedua, ada juga UU Pokok lain, misalnya UUP Kehutanan tahun 1967, yang sempat membuka jalur HPH bagi perusahaan besar *logging* kayu hutan alami, di mana jelas ada intervensi hukum oleh negara yang mirip "pernyataan domain" dari masa Hindia Belanda, atas "lahan tak terpakai oleh penduduk pribumi" (*woeste gronden*)!

Keruwetan "masalah agraria" yang serupa terjadi di Sumatra Utara (bagian timur) masa 1950-an dapat saja terjadi di masa dekat di wilayah penduduk padat (Jawa, dsb) dan penduduk jarang (pulau-pulau besar, juga di bagian timur Indonesia) Pengamat yang jeli pasti sudah mencatat bahwa "itu sudah terjadi dalam masa lebih dari 10 tahun terakhir ini" Yang kita dapat saksikan adalah ketegangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Propinsi), antara DPR Pusat dan DPR Daerah, antara KADIN dan masyarakat sektor informal "orang kecil" petani, buruh tani, dan sebagainya, antara fraksi-fraksi

kontestan pemilu dan ABRI, antara beragam dinas/sector dan juga antara penduduk pribumi dan pendatang

Sebagian jalur kerja sama sudah direkayasa, misalnya model PIR/Bun (Perusahaan Inti dan Rakyat, sector Perkebunan) atau PIR lain. Ataupun "Hubungan Industrial Pancasila" antara pengusaha sedang/besar dan buruh mereka. Kelembagaan baru seperti Serikat Pekerja atau Koperasi Primer (satuan KUD untuk masyarakat desa khususnya) pula dibina dalam program besar-besaran. Karena umumnya pembinaan serba lembaga baru, rekayasa itu masih banyak "top down," tentulah tidak bebas dari kejutan dalam proses pengembangannya di tiap sector, baik di jalur pemerintahan (politik), misalnya LKMD di desa maupun di sector ekonomi secara luas

III

Jika kasus agraria di Sumatra Utara (masa 1947 - 1958) itu dapat dilengkapi dengan data dari sumber lain, misalnya (selain studi yang sempat disebut C. Geertz dalam Pengantarannya) studi oleh Oudemans, Penny dan Klaus terutama hal petani kecil, Dillon dengan kasus eksperimen PIR-Bun di bagian selatan, Stoler perihal buruh perkebunan besar (judul tesis 1983 "*In the Company's shadow labor control*"), tetapi juga studi Brunner dan Pelly perihal migran beragam suku di kota Medan, kita akan memperoleh gambaran lebih lengkap mengenai arti "masalah agraria" dari masa ke masa di suatu wilayah yang terus berkembang penduduknya dan mulai beralih ke masyarakat industrial. Masalah agraria yang memusat pada penguasaan modal tanah berkaitan dengan pola hubungan produksi, tenaga kerja dan desa-kota.

Sebagian masalah itu akan beralih ke masalah bidang "lingkungan" (mencakup lingkungan sosial), tak terbatas antara pelaku besar dan kecil di sector primer pertanian (dalam arti luas, mencakup usaha kehutanan pembaca ingat kasus Sinarua?) melainkan juga menonjolkan pelaku antarsektor petani kecil melawan industri besar, penghasil listrik, aluminium, pulp untuk kertas, dan lain produk teknologi tinggi. Dalam bidang "lingkungan" dan "tata ruang" ini (juga tercakup dalam UUPA 1960 kita) kini ada upaya perumusan kembali kebijakan nasional di mana KLH dan Bappenas memegang peranan inti. Dan LPSM (bukan badan pemerintah) mulai tampil pula, sebagai bagian dari gerakan moral kaum "penghijau" sejagat. Kecuali berebut lahan dan tanah dari lingkungan sama, kita terlibat

dalam perebutan air (untuk makan, rumah tangga, industri) dan udara yang sampai kini masih tak diberi nilai!

Pembagian lahan dan lingkungan antara pemukiman kota dan pedesaan dan keperluan ruang untuk jaringan transportasi antara sejumlah titik pusat yang bertambah (dalam masa 30 tahun mendatang 50% penduduk Indonesia termasuk pemukiman urban) akan menjadi salah satu topik telaah yang minta perhatian kita

Walaupun sektor pertanian makin menjadi sektor yang berkurang pentingnya dalam perekonomian kita, masalah agraria akan tetap kita hadapi, sebagian dalam bentuk "lanjutan" Jika kurang mampu mencapai konsensus tata-cara permainan "kerjasama" antara kita, alternatifnya memang "perlawanan" antarsesama kita, dengan peluang tragedi "yang lemah menjadi korban yang kuat"

IPB, Bogor Maret 1990